

LOK.PPM.3

L O K A K A R Y A
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN
EVALUASI KULIAH KERJA NYATA IPB
BOGOR 21-22 DESEMBER 1988

PERANAN IPB DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh

BAPPEDA PROPINSI DATI I JAWA BARAT

PENYELENGGARA

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1988

PERANAN IPB DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 1)

Oleh

BAPPEDA PROPINSI DATI I JAWA BARAT

I. PENGANTAR

Panitia meminta kepada kami suatu makalah dengan judul:
"PERANAN IPB DALAM PEMBANGUNAN DAERAH"

Kami berusaha memenuhinya dan disistimasikan ke dalam uraian-uraian yang menyangkut hubungan teori dan kebijaksanaan, konsep pembangunan daerah dan kebijaksanaan pembangunan Jawa Barat dalam Pelita V.

Penyajian tentang hubungan teori dan kebijaksanaan, dimaksudkan agar diantara kita mempunyai persepsi yang sama dan menumbuhkan kesadaran akan posisi dan peranan yang berbeda tetapi berada dalam satu rangkaian yang utuh dalam proses pembangunan. Perbedaan hanyalah terletak pada disiplin tugasnya; IPB merupakan teoritisi yang didasari Tri Dharma Perguruan Tinggi serta PEMDA merupakan praktisi dan pelaksana kebijaksanaan pembangunan.

Berangkat dari suatu persepsi yang sama tentang hubungan teori dan kebijaksanaan serta posisi dan peranan masing-masing, diharapkan persepsi yang sama juga menyangkut mengenai konsepsi pembangunan daerah.

1) Disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Program Pengabdian Pada Masyarakat dan Evaluasi KKN IPB, tanggal 21-22 Desember 1988, di LPPM IPB Bogor.

Selanjutnya diinformasikan tentang Kebijakanaksanaan Pembangunan Daerah dalam Pelita V, khususnya dalam hubungan dengan Kebijakanaksanaan Pembangunan Daerah di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian. Uraian yang terakhir ini dimaksudkan agar dalam mencari bentuk-bentuk operasional kerjasama antara Pemerintah Daerah dan IPB dapat lebih efektif dan efisien serta sejalan dengan Kebijakanaksanaan Pembangunan Daerah.

Semoga makalah sederhana ini bermanfaat dalam forum yang penting ini.

II. HUBUNGAN TEORI DAN KEBIJAKSANAAN

1. ILMU, PENGETAHUAN DAN ILMU PENGETAHUAN

ILMU adalah rangkaian upaya yang teratur dari manusia untuk memperoleh kejelasan tentang kedudukan dari suatu "hal" atau obyek atau masalah dalam kaitan berlakunya hukum sebab akibat (hukum kausalitas).

Dalam peristiwa sebab akibat terjadi keteraturan karena itu lalu dapat dibuat patokan-patokan, asas-asas, hukum, dalil dan rumus.

PENGETAHUAN adalah daya tangkap, daya pikir ataupun pemahaman manusia tentang terjadinya/berlakunya hukum kausalitas dengan segala hukum-hukumnya.

Karena itu pengetahuan merupakan tangga pertama bagi ilmu untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang obyek

yang dihadapi. Ini berarti pula bahwa Ilmu adalah merupakan pengetahuan yang teratur dari manusia tentang berlakunya hukum sebab akibat. Untuk itu diperlukan nalar dan fikiran yang tepat (logika dan rasionalitas).

Dengan demikian sifat ilmu adalah skeptis, yakni selalu mempertanyakan. Hal ini dilakukan untuk mencari pengetahuan atau pemahaman yang lebih tepat. Karena itu tugas ilmu adalah mencari pengetahuan.

ILMU PENGETAHUAN yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai science, terkandung didalamnya pengertian ilmu dan pengertian pengetahuan. Sebagai kesatuan istilah, maka Ilmu pengetahuan adalah; "suatu totalitas (keutuhan) ilmu dan pengetahuan manusia yang didalamnya mengandung serangkaian logika, rasionalitas, asas-asas, hukum, dalil dan rumus yang melalui penelitian dan percobaan-percobaan yang teratur (sistematis) serta dilakukan berulang kali, telah teruji kebenarannya dan bahwa logika, rasionalitas, asas-asas, hukum dan dalil serta rumus-rumus tersebut dapat dijabarkan dan dipelajari".

Melalui penelitian dan percobaan-percobaan yang teratur, Ilmu Pengetahuan dapat merumuskan generalisasi yang berlaku umum di segala tempat dan waktu (universal-modial). Kecermatan dalam generalisasi tersebut dapat mempertinggi kualitas daya pemikiran, sehingga dapat pula menganalisis serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan lebih cermat pula, sebaliknya tingkat kesalahan dapat lebih di-

kurangi. Kalau tugas ilmu adalah mencari pengetahuan, maka tugas Ilmu Pengetahuan adalah mencari kebenaran (the truth). Sesuatu yang bersifat ilmiah (scientific) berarti memiliki logika, rasionalitas, asas-asas, hukum, dalil, rumus disamping sistematika.

Sudah dikemukakan bahwa dengan Ilmu Pengetahuan kita dapat memprediksi dan mengantisipasi peristiwa-peristiwa kausal. Dengan demikian secara pragmatis berarti bahwa dengan Ilmu Pengetahuan akan semakin mempertinggi daya analisis kita dalam menghadapi berbagai masalah yang bagaimanapun tidak akan pernah habis-habisnya. Sebab memang hidup manusia adalah hidup dengan serba masalah.

Peranan Ilmu Pengetahuan seperti tersebut di atas berlaku, baik pada cabang studi atau disiplin ilmu eksakta, ilmu sosial maupun humaniora. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa disiplin ilmu sosial dalam penerapan sifat universalitasnya bersifat adaptation (penyesuaian), yang berbeda dengan disiplin ilmu eksakta yang bersifat adoption (adopsi), jadi diterapkan "sebagaimana adanya, dimanapun juga".

2. PARADIGMA, TEORI, MODEL, STRATEGI DAN KEBIJAKSANAAN

PARADIGMA, sebagai "teori dasar" atau "cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan teori pokok, konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritis dan praktisi dalam

menanggapi sesuatu permasalahan, baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan kemanusiaan".

TEORI, merupakan ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis antar berbagai variable dalam bidang tertentu sehingga dapat dipergunakan sebagai rangka berfikir untuk memahami dan menanggapi permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut.

MODEL, yaitu simplifikasi realitas ke dalam faktor-faktor atau variable-variable yang dibangun atas dasar suatu teori, dan dijabarkan menurut hubungan kausal dan atau hubungan-hubungan fungsional yang memungkinkan pengembangan suatu strategi atau langkah-langkah kebijaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

STRATEGI, merupakan penjabaran lebih lanjut atau operasionalisasi dari model sehingga merupakan suatu sistem "kebijaksanaan" yang berisikan kebijaksanaan, rencana, program dan aspek-aspek organisasi dan manajemen yang diperlukan bagi implementasinya secara efektif dan efisien.

Dengan demikian teori merupakan peralatan penting dalam penyusunan suatu strategi, memberikan kerangka dasar bagi pengembangan peralatan kebijaksanaan berdasar variable-variable dominan yang ada dalam suatu bangunan model yang berdiri di atas dasar suatu teori.

Apabila teori merupakan ungkapan mengenai hubungan kausal antar variable sehingga dapat dipergunakan sebagai

rangka berfikir untuk memahami dan mengembangkan alternatif pemecahan permasalahan tertentu, sedangkan strategi merupakan suatu disain yang berisikan rangkaian kebijaksanaan dan pelaksanaan ("policy decision and course of actions") untuk pencapaian tujuan dalam dimensi waktu tertentu, maka suatu strategi akan beranjak dari kerangka teori dasar atau paradigma tertentu.

Atau secara sederhana perbedaan, persamaan, ataupun hubungan-hubungan antara paradigma, teori, model dan strategi dapat digambarkan sebagai berikut: Strategi beranjak dari suatu model, model dikembangkan atas dasar suatu teori dalam hubungannya dengan realitas permasalahan tertentu, dan teori berpangkal dari suatu paradigma. Karena itu paradigma merupakan sesuatu yang penting, menjadi dasar bagi manusia dalam usahanya untuk memecahkan secara mendalam masalah-masalah kehidupan yang dihadapi, dan mengatasinya secara mendasar.

Mau atau tidak, kalau kita ingin berfikir secara sistematis tentang segala sesuatu, kita harus menggunakan model. Sebagaimana ungkapan pengertian terdahulu, model dapat diartikan sebagai upaya "menyederhanakan pemikiran untuk membangun dan merumuskan konsep-konsep, atau membangun konsep yang saling bertautan, berguna untuk mengklasifikasikan data, merinci kenyataan, dan atau menyusun hipotesa tentang pemecahan permasalahan tertentu".

Yang tersangkut dalam kegiatan membangun model adalah:

(1) mengidentifikasikan variable-variable tertentu dan

terpenting, serta merumuskan hubungan antara mereka, (2) merumuskan spesifikasi sasaran dan kriteria untuk mengukur sasaran, dan (3) mencatat hambatan-hambatan, kondisi-kondisi, serta kendala, tak ketinggalan pula mencatat ketidakpastian yang mempengaruhi berfungsinya sebuah model.

Tidak seorang ahli teori maupun penyusun model yang menyatakan bahwa model itu serupa dengan kenyataan. Mereka hanya mencuplik sifat-sifat umum dan hubungan-hubungan yang penting saja. Mereka melakukan "perintah-perintah", penelitian dan analisis, juga menandai faktor-faktor yang mungkin terluput dari pengamatan. Akhirnya mereka mampu merumuskan variable-variable, dan kemudian menyusun proposisinya.

Strategi, sebagai keseluruhan langkah (kebijaksanaan-kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi sesuatu persoalan. Dengan kata lain strategi merupakan "perhitungan" mengenai rangkaian kebijaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan.

Secara teknis perbedaan antara strategi dan kebijaksanaan hanya terletak dalam ruang lingkup, strategi lebih luas daripada kebijaksanaan, dan dengan demikian maka kebijaksanaan merupakan bagian daripada strategi. Dalam hubungannya dengan teori, maka strategi yang berisikan pilihan-pilihan alternatif tidak bebas dari kecenderungan-kecenderungan nilai.

Kebijaksanaan, dalam arti luas dapat diartikan sebagai bagian dari upaya manusia untuk mencapai tujuan. Dengan demikian kebijaksanaan adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu atau sejumlah tujuan.

Dapat pula dirumuskan suatu definisi kerja mengenai kebijaksanaan, yaitu "Keputusan" suatu organisasi ("publik/bisnis) yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan "pedoman perilaku" dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik oleh kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijaksanaan, dan (2) penerapan atau pelaksanaan dari sesuatu kebijaksanaan yang telah diterapkan, baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Dengan demikian kebijaksanaan hakekatnya adalah keputusan yang diambil untuk mencapai nilai atau manfaat tertentu yang lazimnya harus melebihi pengorbanan yang dikeluarkan oleh para pelaku ataupun kelompok sasaran kebijaksanaan yang bersangkutan.

Secara analitis dapat dibedakan dua unsur pokok yang terdapat dalam suatu kebijaksanaan, yaitu tujuan kebijaksanaan dan cara atau peralatan untuk mencapai tujuan.

Secara hierarkhis dikenal 3 (tiga) strata kebijaksanaan pokok yaitu (1) kebijaksanaan strategis, (2) kebijaksanaan manajerial, dan (3) kebijaksanaan teknis operasional.

Dalam kebijaksanaan dikenal juga siklus kebijaksanaan yang terdiri atas tiga kelompok kegiatan pokok, yaitu (1) "perumusan kebijaksanaan", (2) "pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan", (3) penilaian serta pengawasan hasil pelaksanaan kebijaksanaan".

III. KONSEP PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia mengenai Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Pusat diatur melalui Undang-undang Dasar 1945, sedang penyelenggaraan pemerintah di Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintah.

Dalam Undang-undang 5/1974 ini diatur tentang pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom, yang berarti bahwa dalam Undang-undang ini diatur penyelenggaraan berdasarkan azas dekonsentrasi, desentralisasi dan medebewind atau azas pembantuan di daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini diatur pula fungsi dan tugas pokok Gubernur, Bupati dan Walikota serta Kepala Daerah dan Kepala Wilayah sebagai administrator

tunggal di Daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kehidupan Masyarakat. Dalam rangka mempertanggungjawabkan tugasnya Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan demikian maka berarti bahwa koordinasi segala kegiatan di daerah yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan Kehidupan masyarakat berada di tangan Kepala Daerah dan Kepala Wilayah.

Untuk bidang pembangunan berikut ini akan diuraikan mengenai konsepsi pembangunan yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia. Dilihat dari tingkat kepentingan, pembangunan itu ada yang mempunyai ruang lingkup nasional, ruang lingkup regional, ruang lingkup lokal. Pembangunan dengan ruang lingkup nasional adalah pembangunan yang bernilai strategis yang menyangkut kepentingan nasional dan bermanfaat bagi seluruh bangsa. Pembangunan seperti ini pada umumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat, sedang pembangunan dengan ruang lingkup dan bernilai regional, serta menyangkut kepentingan bagi masyarakat di Daerah tersebut ditangani oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II. Untuk pembangunan dengan ruang lingkup lokal dan bernilai serta pengaruhnya langsung dirasakan masyarakat ditangani oleh pemerintah setempat dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pembangunan di daerah mengenai berbagai bentuk konsepsi pembangunan yang

dijalankan selama ini yang berbeda satu sama lain, baik sifat, sumber pembiayaan maupun unsur-unsur kewenangannya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsepsi pertama ialah disebut pembangunan nasional atau kadang disebut pula sebagai "Pembangunan Sektoral". Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan Sektoral ini adalah sebagai penjelmaan dari azas dekonsentrasi.
2. Konsepsi yang kedua ialah yang disebut "Pembangunan Daerah" yang merupakan perwujudan dari azas desentralisasi, konsepsi ini merupakan kebalikan daripada konsepsi yang pertama.
3. Konsepsi ketiga dalam rangka Pembangunan Daerah, adalah Pembangunan Daerah sebagai penjelmaan dari azas tugas pembantuan (medebewind), yaitu konsepsi Pembangunan Daerah yang ditinjau dari segi Kebijakanaksanaan, pembiayaan, dan pengelolaan, berbeda dengan Pembangunan Daerah Murni, yang pada umumnya merupakan perpaduan di antara kedua sistem pembangunan yang telah disebutkan pada butir 1 dan 2.

Pembangunan semacam ini terutama dalam bentuk Program Bantuan Pembangunan Daerah yang sering dikenal sebagai Program INPRES, yang sampai saat ini terdapat sembilan macam Program INPRES.

Program INPRES ini dimaksudkan sebagai usaha pendorong Pemerintah Daerah untuk lebih mampu melaksanakan pembangunan

daerah dalam bidang-bidang yang menjadi urusan rumah tangga sendiri, dimana Pemerintah menyadari akan keterbatasan dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu ciri-ciri yang menonjol dalam konsepsi Program INPRES ini, antara lain:

1. Pembiayaan disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan keharusan untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan.
2. Kebijakan program ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan perencanaan teknis dan pengelolaan pelaksanaan diserahkan kepada Aparat Pemerintah Daerah, dengan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan kepada Pemerintah Pusat atas pelaksanaannya.
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara koordinatif oleh Departemen Dalam Negeri beserta Departemen-departemen Teknis yang bersangkutan.

Keseluruhan pembangunan yang berlangsung di daerah tersebut, apabila dilihat dari tipologinya dapat dibedakan:

1. Atas dasar azas penyelenggaraannya meliputi:
 - Pembangunan dalam rangka azas Dekonsentrasi
 - Pembangunan dalam rangka azas Desentralisasi
 - Pembangunan dalam rangka azas Pembantuan (Medebewind)
2. Atas dasar tingkat kepentingannya, meliputi:
 - Pembangunan Nasional

- Pembangunan Regional
 - Pembangunan Lokal
3. Atas dasar sifat/ciri-cirinya, meliputi:
- Pembangunan Pedesaan
 - Pembangunan Perkotaan
4. Atas dasar pengelolaannya, dapat diperinci:
- Pembangunan oleh Pemerintah Pusat
 - Pembangunan oleh Pemerintah Dati I
 - Pembangunan oleh Pemerintah Dati II
 - Pembangunan oleh Masyarakat/Swasta

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan daerah pada umumnya adalah:

1. Memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk pengembangan daerah yang bersangkutan.
2. Mengusahakan agar daerah-daerah yang secara relatif masih terbelakang dapat berkembang dengan laju yang lebih cepat daripada daerah-daerah lainnya, sehingga dapat dikurangi kesenjangan yang menyolok dalam tingkat kemajuan antar daerah dan pendapatan antar golongan masyarakat di dalam masing-masing daerah, agar tercapai pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya secara regional.
3. Mengusahakan agar peranan daerah-daerah yang relatif terbelakang makin lama makin besar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Nasional.

IV. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PELITA V

Dalam kurun waktu Pelita V pembangunan di Jawa Barat bertumpu pada Lima Kebijakan Strategis, sebagai berikut:

1. Kebijakan peningkatan mutu sumberdaya manusia;
2. Kebijakan perluasan dan pengembangan aktivitas ekonomi yang menunjang pengembangan lembaga ekonomi terutama Koperasi;
3. Kebijakan perluasan kesempatan kerja yang wajar, terutama di daerah pedesaan;
4. Kebijakan pendayagunaan Aparatur Pemerintah di Daerah;
5. Kebijakan dalam pemanfaatan dan pelestarian keseimbangan sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Adapun tujuan Pelita V Daerah, adalah:

- Pertama : Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin adil dan merata.
- Kedua : Memoertahankan fungsi hidroorologis bagi areal yang sudah maupun yang masih harus memerankan fungsi hidroorologis dalam rangka terjaminnya kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan.
- Ketiga : Meningkatkan pendayagunaan Aparatur Pemerintahan dalam rangka memantapkan pengendalian, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat.

disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi di daerah selama kurun waktu PELITA V.

Dalam Lima Kebijaksanaan Strategis tersebut terkandung kebijaksanaan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas yang dinamis sesuai dengan Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

Dengan demikian kebijaksanaan pembangunan, pada setiap bidang dan di setiap Wilayah Pembangunan harus berwawasan lima kebijaksanaan strategis.

Arah dan kebijaksanaan pembangunan di bidang pendidikan terutama Pendidikan Tinggi adakah:

Pertama, peningkatan peranserta Perguruan Tinggi dalam proses pembangunan Jawa Barat yang diarahkan dalam hal perencanaan, penelitian dan pengkajian pelaksanaan Pembangunan di berbagai sektor.

Untuk itu perlu adanya pengembangan Perguruan Tinggi, termasuk Jatinangor sebagai pusat pengembangan Perguruan Tinggi di Jawa Barat.

Kedua, mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan pendidikan tinggi pada hal-hal yang mendukung pembangunan daerah dan terkait erat dengan kebijaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya dalam pembinaan dan peningkatan peranserta lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan dalam proses pembangunan Jawa Barat.

Adapun arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan lebih ditekankan pada penggunaan teknologi terapan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi terutama dalam sektor-sektor pembangunan prioritas dan berorientasi pada perwilayahan pembangunan.

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai antara lain adalah, makin efektifnya penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata dalam rangka percepatan pembangunan pedesaan yang terkait erat dengan kebijaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan efektivitas pelaksanaan program pembinaan kehidupan Kampus.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam program pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian, adalah:

1. Terwujudnya agenda penelitian yang berorientasi pada pembangunan daerah.
2. Meningkatnya minat dan kreativitas pemuda untuk menghasilkan karya ilmiah atau teknologi terapan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat.
3. Makin berkembangnya kegiatan penelitian yang diikuti dengan makin baiknya koordinasi antara lembaga penelitian, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk menunjang pembangunan di daerah.

V. PENUTUP

Memperhatikan uraian terdahulu dapat disimpulkan eratny hubungan antara Lembaga Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah dalam konteks Pembangunan Daerah, terutama dilihat dai posisi dan peranan sesuai disiplin tugas masing-masing.

Atas dasar kesimpulan tersebut beberapa issue pokok perlu mendapat pembahasan dalam forum ini. Beberapa issue tersebut antara lain:

1. Titik temu di antara disiplin tugas antara IPB dengan PEMDA perlu dipertegas, terutama untuk kepentingan penyusunan program Kerjasama dalam Pelita V.
2. "Model" merupakan titik temu dan atau jembatan antara disiplin tugas pada akademisi yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi dengan para praktisi di lingkungan PEMDA.
3. Pengembangan model seyogyanya berorientasi kepada pengisian terhadap konsep pembangunan daerah, yang mempunyai lima ciri (menurut: azas, tingkat kepentingan, sifat pembangunan dan pengelolaannya).
4. KKN sebagai salah satu modus operandi dalam aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dijadikan tangga/jenjang untuk lebih mengintensifkan studi implementasi program.
5. Intensifikasi studi implementasi program lebih lanjut dapat digunakan untuk penyusunan model pembangunan daerah yang ditandai oleh karakteristik lokal yang beragam.

6. Intensifikasi studi implementasi program dalam rangka membangun model pembangunan di daerah seyogyanya merupakan pengisian terhadap Kerjasama Pemda Jawa Barat dengan segenap Perguruan Tinggi di Jawa Barat tentang Jaringan Informasi Penelitian yang lebih berorientasi kepada pembangunan Daerah.